

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Kebocoran data yang terjadi di platform Tokopedia pada 2020 tahun lalu adalah bukti bahwa lemahnya hukum pemerintah terkait perlindungan data pribadi. Pada tahun 2020 tidak ada dasar hukum yang menaungi terkait perlindungan data, sehingga penyebaran data pribadi bisa dianggap bukan tindakan kriminal. Selain itu perlindungan data dari pihak Tokopedia yang lemah juga menjadi alasan bagaimana platform tersebut mengalami kebocoran data. Saat ini Tokopedia tengah melakukan perbaikan dalam rangka melindungi data pribadi baik dari sisi pembeli maupun penjual, inovasi yang diberikan Tokopedia diharapkan mampu mencegah kasus 2020 tahun lalu tidak terjadi lagi.
2. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang telah di resmikan pada tahun 2022 adalah upaya pemerintah untuk melindungi data pribadi masyarakat baik dari sosial media, pemerintah, BUMN, maupun swasta. Namun pada praktiknya, penyusunan undang-undang tersebut tidak melibatkan pihak swasta yang mewakili masyarakat, sehingga menjadi hal yang simpang-siur sejauh mana pihak swasta dapat mengakses data masyarakat.

#### **5.2 Saran**

Setelah melakukan penelitian dan menarik kesimpulan, peneliti juga menarik beberapa saran pada penelitian tersebut, antara lain :

1. Pihak Tokopedia harus mengoptimalkan pengamanan data pribadi baik dari pihak pembeli ataupun pihak penjual. Diharapkan kasus yang terjadi pada tahun 2020 silam tidak terjadi lagi, pihak Tokopedia juga diharapkan mampu membuat sistem untuk mencegah kebocoran data pribadi.
2. Dalam pembuatan undang-undang mengenai sistem digital, diharapkan pemerintah melibatkan pihak swasta untuk mencegah kesimpang-siuran terjadi antara pihak swasta dan pihak pemerintah.

3. Diperlukannya relasi antara pemerintah dan swasta dalam melakukan tindakan preventif dan menangani kebocoran data dengan mengesampingkan stigma buruk terhadap suatu instansi atau lembaga.